
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN SUMEDANG

Suherman^{*1}, Agi Agustin², Elsa Sandra Lestari³, Fatimah Situ Muslimah⁴, Teuku Rizki Hidayat⁵,
Yogie Sidiq Maulana⁶
^{1,2,3,4,5,6}Univeristas Sebelas Aptil

Article Info

Article history:

Received Des 23, 2023

Revised Des 25, 2023

Accepted Des 27, 2023

Keywords:

*Public Policy
Implementation of Public
Policy
E-Government
Digital Identity*

ABSTRACT

This research was conducted to analyze the implementation of the Digital Identity policy in Sumedang Regency. Not only about the implementation but also analyzing the inhibiting factors and efforts to overcome obstacles in implementing the digital population identity policy in Sumedang Regency. the research method used is qualitative with data collection techniques consisting of literature study and field study. While data processing is done through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research informants were employees of the Population and Civil Registration Office of Sumedang Regency where the determination of informants used purposive sampling techniques. The results showed that the implementation of the digital population identity policy in Sumedang Regency can be said to be quite good because it can be seen from the information from several sources shared with researchers that employees always try to do as much service as possible so that the service is satisfactory for department employees and ASN. Factors that hinder implementation are the competence of service officers and the quality of service supporting facilities and infrastructure.



Copyright © 2023 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Suherman
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas April
Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang
Email: suherman@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Kebutuhan pada zaman sekarang yang berhubungan dengan informasi sangatlah dibutuhkan dan penting untuk diketahui guna memperbaharui wawasan serta pengetahuan yang dimiliki setiap individu maupun kelompok. Setiap individu maupun kelompok ini, membutuhkan berbagai informasi yang relevan, berdasarkan fakta, serta tepat waktu. Namun dalam implementasi yang terdapat di lapangan masih belum sesuai dengan yang ingin didapat atau belum tercapai seperti yang diinginkan, karena kurangnya wadah yang berhubungan dengan informasi yang sesuai perkembangan zaman dan dibutuhkan oleh instansi swasta atau pemerintah ini. Saat ini, segala bentuk pekerjaan hampir keseluruhan menggunakan perlengkapan teknologi, salah satunya adalah komputer sebagai penunjang pekerjaan agar mencapai hasil yang optimal.

Peranan teknologi semakin penting dalam kegiatan administrasi ketika inovasi teknologi informasi dan telekomunikasi terus menerus terjadi. Posisi teknologi tersebut semakin lebih penting ketika inovasi tersebut berhasil menggabungkan teknologi informasi dan telekomunikasi ini (misalnya internet). Penggabungan teknologi informasi dan telekomunikasi ini berdampak kepada reformasi dalam setiap bidang kehidupan manusia baik bisnis, Negara, maupun kehidupan sehari-hari.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia bisnis (e-commerce), perbankan (e-banking), pemerintahan (e-Government), data kependudukan (e-KTP), pendidikan (e-education, e-learning), kesehatan (e-medicine, e-laboratory), dan lain sebagainya yang kesemuanya itu berbasis elektronik.

Pemerintah menerapkan e-Government yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung jawab, responsif, efektif, dan efisien. E-Government memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan serta untuk meningkatkan daya saing dengan negara – negara lain. Seperti tercantum dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik. E-Government merupakan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik agar adapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi masyarakat, serta meningkatkan transparansi publik.

Salah satu penerapan implementasi e-Government dalam pelayanan publik dengan menggunakan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Disdukcapil Sumedang adalah pemusatan / pensasaran kepada dinas – dinas / para pegawai ASN yang ada di kabupaten sumedang.

Permasalahan yang terjadi pada e-ktp digital ini yaitu: ketika peneliti berada di lapangan, peneliti menemukan permasalahan salah-satu nya di dinas kabupaten sumedang saat berada di lapangan ada pegawai ASN yang bertanya perihal penggunaan KTP Identitas Kependudukan Digital ini, apakah dalam satu HP bisa menggunakan dua akun untuk menggunakan KTP Identitas Kependudukan Digital, apakah lansia yang tidak memiliki KTP Identitas Kependudukan Digital tidak ada masalah, bagaimana mengatasi permasalahan jaringan yang tidak bagus dalam KTP Identitas Kependudukan Digital ketika melakukan pendaftaran, bagaimana mengatasi nik yang tidak terdaftar pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital.

Diujicoba kan di 58 kabupaten/kota, salah-satu syarat untuk mendapatkan identitas Identitas Kependudukan Digital ini memiliki ponsel pintar (namun untuk hp iPhone belum bisa /smartphone android bisa). Selain itu harus memiliki jaringan internet, meski begitu orang yang tidak memiliki smartphone tidak perlu khawatir, karena akan ada pelayan double track system service.yaitu pelayanan jalur digital dan jalur manual. Masyarakat yang belum memiliki aplikasi digital atau jaringan nya tidak bagus id akan tetap dilayani dengan cara manual . Identitas digital penduduk akan lebih mudah, cepat,murah dan efisien. e-KTP digital akan melekat pada ponsel masing-masing warga jika ponsel hp nya hilang . Warga bisa datang ke Disdukcapil setempat untuk mengirimkan e-KTP digital ke ponsel yang baru.

Berdasarkan UU no. 24 tahun 2013, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam rangka penerbitan dokumen dan data kependudukan,melalui: (1) pendaftaran penduduk (2) pencatatan sipil (3) pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Tabel 1. Jumlah Penduduk yang Sudah Memiliki Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sumedang

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	WADO	5
2	JATINUNGGAL	8
3	DARMARAJA	8
4	CIBUGEL	3
5	CISITU	16

6	SITURAJA	15
7	CONGGEANG	15
8	PASEH	11
9	SURIAN	1
10	BUAHDUA	6
11	TANJUNGSARI	40
12	SUKASARI	5
13	PAMULIHAN	13
14	CIMANGGUNG	27
15	JATINANGOR	24
16	RANCAKALONG	16
17	SUMEDANG SELATAN	183
18	SUMEDANG UTARA	264
19	GANEAS	17
20	TANJUNGKERTA	42
21	TANJUNGMEDAR	6
22	CIMALAKA	54
23	CISARUA	16
24	TOMO	3
25	UJUNGJAYA	2
26	JATIGEDE	4
TOTAL		804

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Sumedang Tahun 2023*

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan, bahwa Aparat Sipil Negara yang sudah terdaftar pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital Didisdukcapil Kabupaten Sumedang Sebanyak 804 yang tersebar ke 26 desa. Dari masing-masing desa didata sesuai dengan Instansi-instansi dinas yang melakukan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital. Berdasarkan data Aparat Sipil Negara yang melakukan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital dilihat jumlah yang paling banyak adalah di Sumedang Utara sebanyak 264, dan jumlah pendaftaran Identitas Kependudukan Digital yang paling sedikit adalah di Surian sebanyak 1. Oleh karena itu, dengan adanya data tersebut pihak pemerintah masih bertahap memperkenalkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital mulai dari (ASN) Aparat Sipil Negara, Mahasiswa, dan Masyarakat. meskipun tidak perlu anggaran yang banyak, namun pemerintah harus memberikan anggaran untuk kedepannya.

Pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, sasaran selanjutnya yaitu ke semua ASN di kabupaten Sumedang, mahasiswa dan masyarakat. untuk mendukung pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital, maka Presiden Indonesia telah menetapkan Perpres no 112 tahun 2013. Penpres no .25 tahun 2008 tentang pencatatan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dirjen Aplikasi dan Informatika (APTIKA) Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangarepan menyebut masyarakat belum memahami pentingnya melindungi data pribadi mereka di tengah era pertumbuhan pengguna ponsel dan internet yang kian masif. Oleh sebab itu, pihaknya berusaha untuk mengharmonisasikan 32 regulasi soal data pribadi yang diatur oleh sejumlah kementerian. “pertumbuhan dan pengguna telepon seluler dan internet saat ini belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi mereka”.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan beberapa indikasi yang mengarah pada implementasi program Identitas Kependudukan Digital di disdukcapil kabupaten Sumedang. Adapun indikasi-indikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Untuk pengguna android ios aplikasi bisa digunakan, tetapi untuk pengguna smartphone iPhone aplikasi masih belum bisa digunakan.
2. Sasaran untuk pengguna KTP Identitas Kependudukan Digital adalah melalui ASN, mahasiswa, masyarakat. Namun sasaran tujuan masih kepada aparat sipil negara namun keluhannya terdapat ASN yang sudah lanjut usia yang belum memahami penggunaan KTP Identitas Kependudukan Digital.

3. Meskipun tidak mengeluarkan dana yang banyak namun kedepannya untuk pembuatan aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini perlu adanya dana dari pemerintah melalui himbauan dari ASN, mahasiswa, masyarakat.

2. METHOD

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan daripada generalisasi. Sedangkan menurut Sugiono (2017) metode kualitatif adalah Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada konsep objek ilmiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci teknik-teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam melaksanakan penelitian, setiap kegiatan pengumpulan data selalu berhadapan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa manusia, benda, maupun aktifitas-aktifitas atau kejadian-kejadian dimana suatu masalah dapat untuk keseluruhan karakteristik objek penelitian ini disebut objek penelitian. Penentuan informan penelitian ini menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Selanjutnya yang menjadi informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Unsur	Jumlah (Orang)
1.	Plt. Sekretaris / Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan data	1
2.	Analisis Ahli Muda	1
3.	Analisis Data dan Informasi Pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	1
4.	Pranata Komputer	1

Sumber : Hasil Penelitian, 2022

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

- 1) Studi Kepustakaan, penelitian dilakukan melalui sumber-sumber yang akurat dari buku-buku atau perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
- 2) Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung di lapangan, dengan cara:
 - a) Observasi
 - b) Wawancara
 - c) Dokumentasi

Untuk mengelola data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu pada operasi dasar yang menghasilkan keluaran penting yang mengutip dari model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2017) sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data).
2. *Data display* (penyajian data).
3. *Conclusion drawing/verification* (pemeriksaan kesimpulan/verifikasi).

3. RESULTS AND DISCUSSION

Model Implementasi program menurut David C. Korten harus meliputi tiga elemen yang disebutkan dengan model kesesuaian melalui pendekatan proses pembelajaran korten menitikberatkan model ini pada tiga elemen kesesuaian yakni program itu sendiri, pelaksana program dan kelompok sasaran. implementasi akan berjalan baik jika terdapat faktor – faktor antara lain adanya program yang bermanfaat bagi sasaran program jika komunikasi antar aktor dilakukan secara baik, adanya sumber daya yang menjalankan program, dan adanya lembaga yang mendukung kebijakan tersebut serta sikap atau disposisi implementator baik. Adapun tiga implementasi program yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sumedang diantaranya:

a). Program

Menurut Korten, harus adanya kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. untuk itu, indikator suatu program yang baik memuat beberapa aspek diantaranya:

- Adanya tujuan yang jelas

Disdukcapil mempunyai tujuan dengan adanya program Identitas Kependudukan Digital yaitu bertujuan supaya masyarakat lebih tertib Administrasi serta menjaga KTP untuk lebih aman, tidak mudah hilang, lebih efektif dan efisien serta dapat mengurangi penggunaan blanko.

- Adanya Kebijakan – kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan

Kebijakan yang dilakukan oleh Disdukcapil yaitu dengan mengikuti kebijakan dari pemerintah yang dimana kebijakan penerapan tersebut dimulai dari lingkup Disdukcapil setelah itu ke para ASN lanjut kemahasiswa dan yang terakhir ke masyarakat.

- Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan

Untuk perkiraan anggaran tidak membutuhkan anggaran yang cukup besar karena dalam penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital hanya membutuhkan jaringan internet / wifi yang memadai pada saat penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital.

- Adanya strategi dalam pelaksanaan

Strategi yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Sumedang adalah dengan cara bersosialisasi kepada ASN dan Non ASN setelah ASN beres akan lanjut kemahasiswa dan terakhir kemasyarakat.

b). Organisasi Pelaksana

Menurut Korten, harus adanya Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Oleh karena itu, kemampuan implementor merupakan sumberdaya manusia yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi. Untuk itu dengan adanya organisasi pelaksana diharapkan penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital berjalan dengan baik, dengan cara melakukan sosialisasi tentang penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan mensosialisasikan tentang cara menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil adalah dengan langsung datang ke Dinas – Dinas dengan cara langsung melakukan penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital serta memberitahu tentang cara menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Respon pegawai Dinas tentang penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital cukup menerima dan antusias.

c). Kelompok Sasaran

Menurut Korten, harus adanya kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program. Disdukcapil melakukan implementasi program kelompok sasaran dengan menerapkan tepat kebijakan dan tepat target, dengan kebijakan Identitas Kependudukan Digital pasti sama untuk memfokuskan target Identitas Kependudukan Digital kepada para pegawai dinas dan ASN, untuk target selanjutnya mungkin kepada mahasiswa dan masyarakat. Serta tepat target difokuskan terlebih dahulu adalah pegawai ASN sebelum ke mahasiswa dan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Sunggono, terdapat empat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan, diantaranya:

a). Isi Kebijakan

Pertama, belum jelasnya isi suatu kebijakan dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan, yang artinya tujuan tidak cukup rinci. Dengan belum jelasnya isi suatu kebijakan maka dapat menyebabkan terhambat proses penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital.

b). Informasi

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, seharusnya implementor yang terlibat memiliki informasi yang berkaitan dengan kebijakan dalam rangka berperan dalam implementasi kebijakan dengan baik, tetapi kenyataannya belum berjalan dengan baik. Dengan begitu Disdukcapil mempunyai hambatan dalam melakukan sosialisasi tentang informasi yaitu Hambatan sosialisasi mungkin dari kurangnya SDM yang ada di Disdukcapil sehingga masih banyak target yang belum tercapai. Dengan begitu Disdukcapil melakukan distribusi informasi mendistribusikannya melalui media sosial.

c). Dukungan

Disdukcapil mempunyai dukungan pada saat pengimplementasian program baik dukungan dari pihak Disdukcapil sangat mendukung terhadap adanya aplikasi Identitas Kependudukan Digital, karena diharapkan supaya bisa lebih tertib administrasi. Serta Dukungan dari pihak luar seperti ASN dan Non ASN sangat mendukung terkait aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini.

d). Pembagian Potensi

Penyebab yang berkenaan pada tidak tercapainya suatu implementasi kebijakan ditentukan juga oleh unsur pembagian potensi diantaranya implementor kebijakan. Disdukcapil yang mempunyai hambatan terkait kurangnya SDM yang ada sehingga dalam pembagian tugas sering terhambat, tetapi dalam pembagian tanggung jawab pegawai Disdukcapil sudah siap kerja dan membagi tim supaya tidak mengambil resiko dan bisa membagi waktu dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital.

Upaya untuk mengatasi hambatan implemmentasi kebijakan program diantaranya:

a). Isi Kebijakan

Untuk menghindari kesamaran dalam isi kebijakan tentang program Identitas Kependudukan Digital, maka Disdukcapil mengikuti isi kebijakan dari pusat dan tidak bisa diganti lagi. Dan dalam pengambilan keputusan pegawai Disdukcapil melakukan pengambilan keputusan sesuai arahan dari pimpinan.

b). Informasi

Upaya yang dilakukan Disdukcapil mengenai hambatan informasi pada implementasi kebijakan, maka Disdukcapil mempunyai cara untuk mensosialisasikan informasi mengenai Identitas Kependudukan Digital dengan cara mensosialisasikannya lewat Media Sosial Disdukcapil maupun dengan cara langsung datang ke Dinas – Dinas.

c). Dukungan

Dukungan terhadap Disdukcapil pada saat penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital, Disdukcapil melihat partisipasi pegawai ASN sangat bagus, responsif, dan tertib. Dan bukan hanya dukungan dari luar saja tetapi dukungan dari pihak penyelenggara yaitu pegawai Disdukcapil terhadap partisipasi melalui Disduk merupakan tanggung jawab Disdukcapil untuk menghasilkan pelayanan yang baik kepada para pegawai dinas dan ASN.

d). Pembagian Potensi

Pembagian potensi yang dilakukan Disdukcapil adalah dengan pembagian tugas yang jelas dan adil, dan pembagian tanggungjawab yang jelas dengan begitu Disdukcapil dapat membagi waktu dalam sehari kita mendatangi ke dua dinas agar bulan ini sudah beres penerapan Identitas Kependudukan Digital kepada para pegawai dinas dan ASN dan untuk pembagian kerja Disdukcapil memiliki strategi dengan melaksanakan sosialisasi dalam media sosial Disdukcapil dan datang ke dinas.

4. CONCLUSION

Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sumedang sudah bisa dikatakan cukup baik karna dilihat informasi dari beberapa narasumber yang disampaikan dengan peneliti bahwa para pegawai selalu berusaha melakukan pelayanan semaksimal mungkin agar pelayanan memuaskan bagi para pegawai dinas dan ASN. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelayanan Identitas Kependudukan Digital di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sumedang yaitu, *pertama*, kemampuan sumber daya manusia belum optimal dan kurang siap, *kedua*, Server atau jaringan operator yang kurang bagus membuat proses pelayanan kurang cepat; *ketiga*, masih kurangnya jumlah pegawai yang melayani pegawai dinas dan ASN dalam pembuatan akun Identitas Kependudukan Digital, *keempat*, kurangnya sosialisasi. Adapun strategi yang dilakukan yaitu: *pertama*, adanya regulasi dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan Identitas Kependudukan Digital, *kedua*, melakukan pelayanan ekstra dengan cara meningkatkan kedisiplinan pegawai agar pelayanan maksimal, *ketiga*, pembuatan akun Identitas Kependudukan Digital tidak dipungut biaya, *keempat*, adanya partisipasi para pegawai dinas dan ASN untuk melakukan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital.

REFERENCES

- Anggito, A. Dan S.J, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1980; *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Dian Widaningsih, 2021. *Analisis Sistem Infomasi Pembuatan E-KTP Berbasis Web (SILASIDAKEP) Dalam Proses Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
- Disdukcapil. 2022. Yuk, kenali Identitas Kependudukan Digital. PIAK. Jakarta 16 Juli.
- Handyaningrat, Soewarno, 1982; *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Idos Firdaus, 2019. *Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang*.
- Indrawijaya, A.I. 2010. *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: Aditama.
- Jahratul Idami, 2019. *Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil*.
- Nasir, Moh. 1988. *Metode Penelitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patalima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitataif*. Bandung: Alfabeta
- Robbins, SP dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba
- Siagian, Sondang P, 1980; *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Administrasi dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Silalahi, Ulbert. 1997; *Studi Tentang ilmu Administrasi*, Sinar Baru Algesindo Bandung.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

The Liang Gie dan Soetarto, 1980; *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Jogjakarta.

Patalima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitataif*. Bandung: Alfabeta

Wursanto, Lg. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi